



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Senin (*Soma Paing, Kelawu*), 7 Maret 2022

Kepada:

- Yth.
1. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di Bali;
 2. Ketua DPRD Provinsi Bali;
 3. Bupati/Walikota se-Bali;
 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali;
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 6. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 7. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali;
 8. *Bandesa Adat* se-Bali;
 9. *Perbekel* se-Bali;
 10. Kepala BUMN/BUMD;
 11. Pimpinan/Pemilik Industri, Jasa, Hotel, Restoran, dan Perbankan;
 12. Pimpinan/Pemilik Pasar Modern, Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan; serta
 13. Seluruh masyarakat Bali.
- di -
Bali.

SURAT EDARAN

NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP DI PROVINSI BALI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

A. Mempertimbangkan:

- a. Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pada misi ke-21 yaitu Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali, Menata Wilayah dan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Indah, harus diwujudkan melalui Bali Energi Bersih;
- b. Bali Energi Bersih diselenggarakan dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali; dan

- c. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap merupakan kebutuhan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan serta mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas dalam menghadapi perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global.

B. Tujuan:

1. Mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai dasar untuk menjaga Alam beserta isinya serta lingkungan yang bersih, hijau, dan indah bagi kehidupan masyarakat dalam Bali Era Baru.
2. Menjaga dan melestarikan iklim dengan mengurangi pemanasan global dan emisi karbon.
3. Melakukan konservasi dan efisiensi energi sehingga meringankan beban biaya masyarakat melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.
4. Mempercepat peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali.
5. Membuka peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja dalam bidang Energi Terbarukan, khususnya dalam pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.
6. Menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia berkualitas dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

C. Memperhatikan:



1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050; dan
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

D. Mengimbau:

1. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se-Bali, *Bandesa Adat* se-Bali, *Perbekel* se-Bali, Kepala BUMN/BUMD, Pimpinan/Pemilik Industri, Jasa, Hotel, Restoran, dan Perbankan, Pimpinan/Pemilik Pasar Modern, Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan, serta seluruh masyarakat Bali di wilayah Provinsi Bali:
 - a. Bagi bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, agar memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap, untuk bangunan lama dan bangunan baru.
 - b. Bagi bangunan komersial, industri, sosial, dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi agar memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap, untuk bangunan lama dan bangunan baru.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dapat dilaksanakan melalui skema tersambung (*on-grid*) jaringan PLN atau tidak tersambung (*off-grid*) jaringan PLN berdasarkan Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - d. Agar menjadikan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai salah satu syarat untuk mempermudah memperoleh persetujuan bangunan gedung.
 - e. Mendorong Lembaga Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kejuruan untuk:
 - 1) mengembangkan kompetensi di bidang Energi Bersih;
 - 2) mengembangkan kurikulum pembelajaran di bidang Energi Bersih;

- 3) menyiapkan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan melibatkan Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja lokal;
 - 4) menyediakan tempat uji kompetensi dan pelatihan dalam penerapan Energi Bersih khususnya pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap; dan
 - 5) mengembangkan penelitian, kreativitas, dan inovasi penerapan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan dengan teknologi tepat guna dari hulu sampai hilir yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
- f. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pihak untuk memberikan penghargaan/insentif kepada Perorangan, Badan Usaha, Lembaga yang telah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada Perorangan, Badan Usaha, Lembaga, Penggiat, dan Inovator yang berkomitmen dalam pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap maupun teknologi Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan lainnya.
 3. Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin (*Soma Paing, Kelawu*), 7 Maret 2022.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

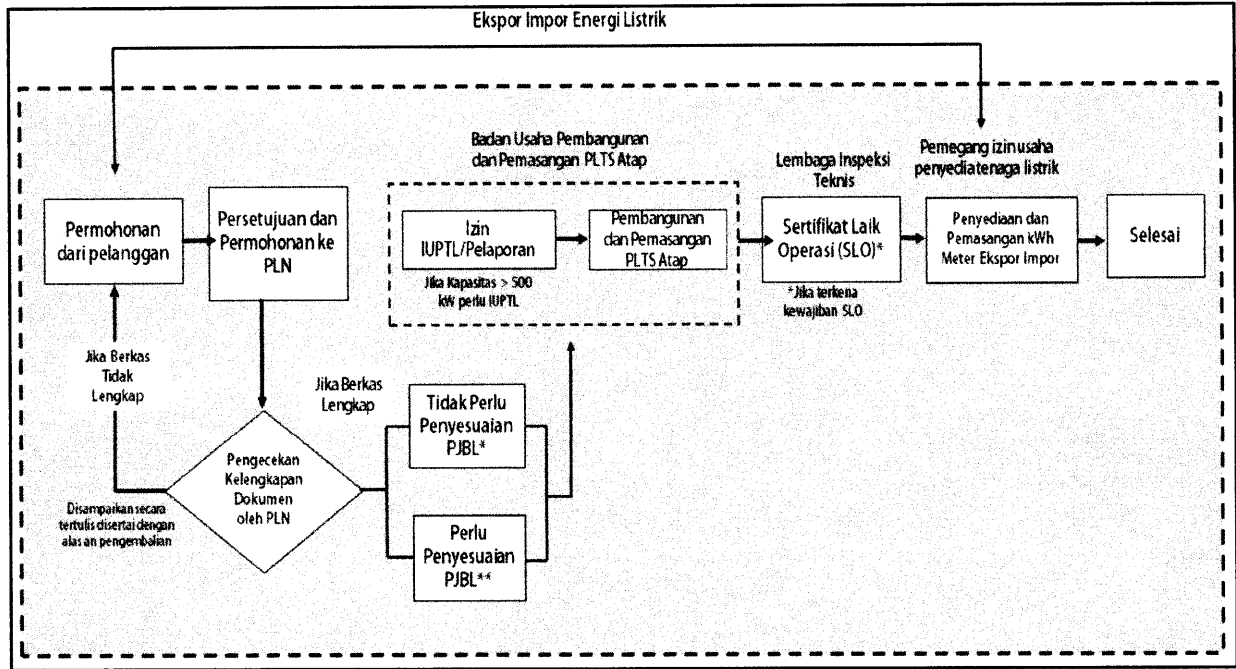
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Menteri BUMN RI di Jakarta;
6. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
7. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
8. Menteri PUPR RI di Jakarta;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
11. Panglima TNI di Jakarta;
12. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
13. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional RI di Jakarta;
14. Direktur Utama PT. PLN (Persero) di Jakarta;
15. General Manager PT. PLN (Persero) UID Bali di Bali; dan
16. Arsip.

LAMPIRAN:

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 5 Tahun 2022
Tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) Atap di Provinsi Bali.

1. Mempedomani Pemasangan sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya sebagaimana tertuang dalam skema dan penjelasan dibawah ini:

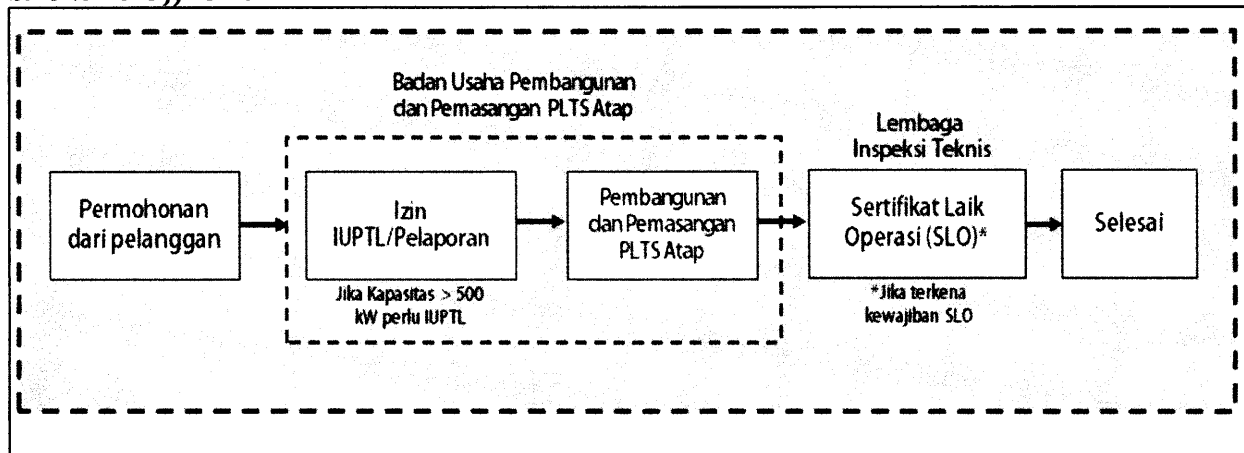
a. Skema *On-Grid (Exim)*



Penjelasan Skema *On-Grid (Exim)*:

No.	Tahapan	Tempat	Pelaksana
1.	Melakukan permohonan ke Loket Pelayanan	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Pelanggan
2.	Pengecekan administrasi dan syarat teknis	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat	Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN (Persero) Setempat
3.	Survey dan pemasangan	Lokasi pemasangan	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
4.	Pengujian	Lokasi pemasangan	Lembaga Inspeksi Teknis
5.	Pemasangan kWh meter ekspor-impor	Lokasi pemasangan	Pemegang IUPTL / PT. PLN (Persero)
6.	Selesai		

b. Skema *Off-Grid*



Penjelasan Skema *Off-Grid*:


No.	Tahapan	Pelaksana
1.	Melakukan permohonan ke Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap	Pelanggan
2.	Tahapan proses administrasi dan lainnya	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
3.	Survey dan pemasangan	Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan PLTS Atap
4.	Pengujian	Lembaga Inspeksi Teknis
5.	Selesai	

2. Skema Pembiayaan :

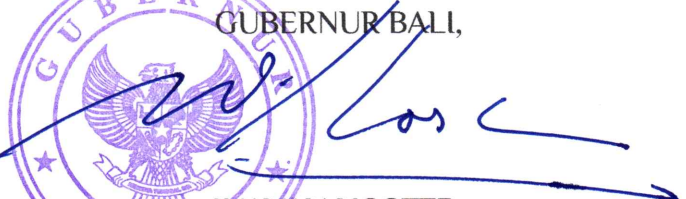
- Beli-Putus melalui pembayaran langsung atau cicilan.
- Kerjasama dengan kesepakatan pada kedua belah pihak, penyedia dan pengguna PLTS Atap.
- Mekanisme dan skema pembiayaan lainnya menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Skema Pembiayaan	Beli-Putus		Zero Capex / Kerjasama	
	Direct Purchase (Pembelian Langsung)	Cicilan	Solar Lease	Performance Based Renting (Solar PPA)
Resiko - resiko	+ Kepemilikan sistem PLTS Atap secara penuh	+ Biaya di muka menjadi cukup rendah	+ Pembayaran dilakukan secara bertahap sehingga harga sistem lebih terjangkau	+ Pembayaran secara bertahap sehingga lebih terjangkau
	+ Penghematan listrik langsung bisa dirasakan (tidak ada biaya berjalan)	+ Kepemilikan sistem setelah pembayaran cicilan selesai	+ Kepemilikan sistem setelah pembayaran selesai	+ Pembayaran berdasarkan energi yang dihasilkan
	- Biaya dimuka cukup besar	- Biaya O&M ditanggung oleh pengguna	+ Biaya O&M umumnya ditanggung provider	+ Biaya O&M umumnya ditanggung provider
	- Biaya O&M ditanggung sepenuhnya oleh pengguna	- Total biaya investasi sistem menjadi lebih besar	- Manfaat penghematan tidak bisa dirasakan langsung karena ada biaya berjalan	- Penghematan tidak bisa dirasakan langsung (terdapat biaya berjalan)
			- Perbedaan tingkat suku bunga dari masing-masing provider	- Perbedaan tingkat suku bunga dari masing-masing provider

Skema Pembiayaan	Beli-Putus		Zero Capex / Kerjasama	
	Direct Purchase (Pembelian Langsung)	Cicilan	Solar Lease	Performance Based Renting (Solar PPA)
				- Skema pembiayaan cukup kompleks
Potensi Pembiayaan	Pembiayaan mandiri	Perbankan melalui penyedia sistem PLTS Atap (installer)	Pembiayaan komersial melalui pengembang proyek PLTS Atap	Pembiayaan komersial melalui pengembang proyek PLTS Atap
Kapasitas minimal	Tidak ada	Tidak ada	Umumnya > 500 kWp	Umumnya > 500 kWp
Masa kontrak	Tidak ada	1 – 5 Tahun	15 – 20 Tahun	15 – 20 Tahun
Pengguna	Pemerintah, Residensial Komersial dan Industri	Pemerintah, Residensial Komersial dan Industri	Komersial dan Industri	Komersial dan Industri



 GUBERNUR BALI,



 WAYAN KOSTER